

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan dan Asimetri Informasi

2.1.1.1 Teori Keagenan

Konsep teori keagenan menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) adalah:

“Hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. Principal mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal* dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent* mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.”

Menurut Jensen dan Meckling dalam Nurhandono dan Firmansyah (2017) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency teory*) sebagai berikut:

“Perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manager (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.”

Sementara Jansen dalam Wicaksono (2017) menjelaskan teori keagenan adalah:

“Istilah yang sering digunakan di dalam menggambarkan *agency theory* yakni *principal* sebagai pemegang saham dan *agent* sebagai manajemen yang mengelola perusahaan. Kemudian, dalam mewujudkan kontrak kerja yang dimaksud, maka pemegang saham menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Pihak *agent* sebagai pengelola perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan operasional perusahaan sebagaimana diamanahkan oleh para pemegang saham (*principal*). Upaya didalam peningkatan kemakmuran pemegang saham dapat melalui peningkatan nilai perusahaan. Berikut sebagai imbalan adalah menejer akan memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya.”

Adanya hubungan antara *principal* dan *agent* dapat menyebabkan beberapa permasalahan berupa informasi asimetri dan konflik kepentingan, seperti dijelaskan oleh Meisser, et. al., (2006:7) yaitu :

- a. “terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik;
- b. terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidak samaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.”

2.1.1.2 Asimetri Informasi

Pengertian asimetri informasi menurut Scott (2009:105) sebagai berikut :

“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the assets being traded the other type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry.”

Jika diartikan, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Menurut Jogiyanto (2010:387) pengertian asimetri informasi, yaitu: Asimetri informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki.

Menurut Mamduh M. Hanafi (2014:217) :

“Konsep *signaling* dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana terdapat ketimpangan informasi antara dua pihak yaitu pihak-pihak yang berada dalam lingkup internal dan pihak lainnya yang berada di luar perusahaan. Dalam lingkup perpajakan, asimetri informasi terjadi diantara wajib pajak dan Fiskus, dikarenakan adanya asimetri informasi ini maka tindakan-tindakan untuk agresivitas pajak dapat terjadi.

2.1.1.3 Jenis – Jenis Asimetri Informasi

Scott membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul daripada pihak lainnya.

Menurut Scott (2009:13), dua jenis asimetri informasi yaitu:

1. *“Adverse Selection*
Adverse selection is a type of information asymmetry where by one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties.
2. *Moral Hazard*
Moral hazard is a type of information asymmetry where by one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot.”

Berdasarkan pernyataan di atas *adverse selection* adalah suatu jenis asimetri informasi dimana salah satu atau beberapa pihak dalam transaksi bisnis atau transaksi potensial, mempunyai keuntungan informasi dibanding pihak yang lainnya.

Sedangkan *moral hazard* adalah jenis informasi dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial, dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan transaksi tetapi pihak lain tidak bisa. Berbeda dengan *adverse selection*, dalam *moral hazard* ketimpangan informasi benar-benar merugikan pihak lainnya, karena pihak lainnya sama sekali tidak mengetahui adanya informasi khusus yang dimiliki oleh pihak lawan.

2.1.2 Lindung Nilai

2.1.2.1 Pengertian Lindung Nilai

Menurut Loen dan Ericcson (2007:38) *hedging* atau lindung nilai adalah:

“Pemagaran risiko karena ketidakpastian yang disebabkan oleh fluktuasi kurs. *Hedging* melindungi risiko kurs atas:

- a. kewajiban membayar valuta asing di waktu yang akan datang;
- b. penerimaan piutang valuta asing di waktu yang akan datang;
- c. pinjaman dalam valuta asing;
- d. deposit atau investasi dalam valuta asing.”

Menurut Madura (2007:220) lindung nilai adalah: “tindakan yang diambil untuk melindungi suatu perusahaan terhadap pergerakan nilai tukar.”

Menurut Eiteman, David K. (2010:232) *hedging* (lindung nilai) adalah: “...mengambil suatu posisi, memperoleh suatu arus kas, aset, atau kontrak (termasuk kontrak *forward*) yang akan naik (atau turun) nilainya dan meng-

offsetnya dengan suatu penurunan (atau kenaikan) nilai dari suatu posisi yang sudah ada.”

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *hedging* atau lindung nilai merupakan penggunaan instrumen keuangan untuk melindungi suatu risiko, khususnya fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Dengan melakukan lindung nilai perusahaan dapat menjaga ketidakpastian atas lonjakan pembayaran akibat adanya perubahan kurs dimasa mendatang.

2.1.2.2 Teknik Lindung Nilai

Menurut Turner (2011:62) lindung nilai dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu *natural hedging* dan *financial hedging*. Masing-masing metode dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Natural Hedging

Menurut Turner (2011:62) *natural hedging* adalah :

“Natural hedging is where we reduce the difference between receipts and payments in a foreign currency by engaging in other transactions in that currency.”

Jika diterjemahkan bahwa lindung nilai alami adalah dimana kita mengurangi perbedaan antara penerimaan dan pembayaran dalam mata uang asing dengan mengikat transaksi dalam mata uang tersebut.

Sedangkan lindung nilai alami menurut Horne dan Wachowicz (2007:558) adalah:

“Lindung nilai yang terjadi secara alami sebagai hasil dari operasi normal perusahaan. Contohnya, pendapatan yang diterima dalam mata

uang asing dan digunakan untuk membayar berbagai komitmen dalam mata uang yang sama, akan membentuk lindung nilai alami.”

Menurut Ehrhardt dan Brigham (2014:939) menjelaskan lindung nilai alami merupakan *“Natural hedge is transaction between two counterparties whose risk are mirror images of each other.”*

Jika diterjemahkan, lindung nilai alami adalah transaksi antara dua pihak yang risikonya merupakan cerminan yang sama antara satu dan yang lain.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Wang (2009:301) dengan istilah *balance sheet hedge*, yaitu:

“Balance sheet hedge is to minimize accounting exposure by matching foreign currency assets and foreign currency liabilities on the balance sheet. When a change in the foreign exchange rate leads to a change in the value of the assets on consolidated balance sheet, a change of the same size but of the opposite sign will take place in the value of the liabilities on the consolidated balance sheet.”

Balance sheet hedge adalah cara untuk meminimalkan eksposur akuntansi dengan menyandingkan aset valuta asing dan kewajiban valuta asing dalam neraca. Ketika terjadi perubahan dalam kurs valuta asing yang mengarah kepada nilai aset dalam neraca konsolidasi, maka perubahan dengan nilai yang sama juga akan terjadi pada nilai kewajiban dalam neraca konsolidasi namun dengan tanda yang berbeda.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lindung nilai alami, adalah salah satu cara perusahaan untuk mengurangi risiko fluktuasi kurs valuta asing dengan cara menjaga tingkat kepemilikan mata uang asing yang biasa digunakan sebagai transaksi jual beli. Dengan menggunakan mata uang asing yang sama antara aset dan kewajiban maka perusahaan dapat

melindungi kewajiban valuta asingnya, karena jika aset valuta asing mengalami perubahan yang signifikan maka kewajiban valuta asingnya pun demikian, sehingga perusahaan diharuskan memiliki suatu rasio perbandingan tertentu antara aset valuta asing dan kewajiban valuta asing sebagai bentuk lindung nilai alami.

b. Financial Hedging

Sedangkan yang dimaksud *financial hedging* menurut Turner (2011:62) adalah:

“...buying foreign exchange hedging instrument that are typically available from banks. The one most commonly used are forward contracts, currency options, and currency swaps.”

Jika diartikan adalah membeli instrumen lindung nilai mata uang asing yang tersedia di bank. Beberapa yang sering digunakan antara lain kontrak *forward*, *currency options* dan *currency swaps*.

Loen dan Ericsson (2007:38) menjelaskan lindung nilai dilakukan *“...dengan menggunakan transaksi forward, swap, option dan produk derivatif lain.”*

Hull (2006:45) menjelaskan bahwa:

“penggunaan kontrak derivative diharapkan dapat mendekatkan pada kondisi lindung nilai yang sesempurna mungkin sehingga nantinya diharapkan imbal hasil yang diperoleh dapat sesuai dengan imbal hasil yang telah diperkirakan (expected return).”

Menurut Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/21/PBI/2014 terdapat empat macam instrument derivatif yang

digunakan sebagai instrumen lindung nilai yaitu *futures*, *forward*, *swap*, dan *option*. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing instrument derivatif tersebut:

1. Kontrak *Future*

Menurut Subramanyam dan Wild (2012:357):

“Kontrak *future* merupakan perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk membeli atau menjual komoditas tertentu atau aset keuangan pada tanggal tertentu di masa depan (yang disebut tanggal penyerahan) pada harga tertentu.”

2. Kontrak *forward*

Menurut Kasidi (2014:129) Kontrak *forward* secara legal adalah

“Perjanjian mengikat antara dua pihak yang meminta penjualan aset atau produk di masa yang akan datang dengan harga yang disetujui pada hari ini.”

3. Kontrak *Swap*

Menurut Subramanyam dan Wild (2012:357), yang dimaksud *swap* adalah:

“*Swap* merupakan perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk menukar arus kas masa depan. Kontrak ini umumnya digunakan sebagai perlindungan atas risiko seperti tingkat bunga dan risiko kurs valuta asing.”

4. Kontrak Opsi

Menurut Subramanyam dan Wild (2012:358) :

“Kontrak opsi memberikan hak pada suatu pihak (bukan kewajiban) untuk melakukan suatu transaksi. Ada dua tipe opsi, yaitu:

- a. Opsi jual (*put option*)
adalah opsi untuk menjual sekuritas (atau komoditas) dengan harga tertentu pada atau sebelum tanggal penyerahan.
- b. Opsi beli (*call option*)
adalah hak untuk membeli sekuritas (atau komoditas) dengan harga

tertentu pada atau sebelum tanggal penyerahan.

Kontrak opsi memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual mata uang tertentu. Keputusan untuk menjalankan hak yang dimiliki sepenuhnya ditentukan oleh pemegang opsi. Jadi, transaksi di pasar opsi tidak harus diikuti dengan penyelesaian transaksi sebagaimana terdapat pada kontrak *forward* dan *future*.”

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa *financial hedge* dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen derivatif, adapun jenis derivatif yang digunakan untuk lindung nilai antara lain *future*, *forward*, *swap* dan *option*.

2.1.2.3 Pengukuran Lindung Nilai

Berdasarkan beberapa literatur, terdapat beberapa cara untuk mengukur lindung nilai antara lain:

1. *Fair Value of Derivatives Instrument (FVDER)*

Variabel nilai wajar lindung nilai menurut Donohoe dalam Sitinjak dan Martani (2019) adalah nilai absolut dari *net fair value* instrumen derivatif (tujuan lindung nilai) dibagi total aset.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$FVHD = \frac{AFVHD \text{ it}}{TA \text{ it}}$$

Penjelasan:

FVHD = Nilai Wajar Lindung Nilai

AFVHDit = Nilai absolut dari *net fair value of derivative instrument*
(bukan untuk *trading*) perusahaan i pada tahun t

TAit = Total Aset Perusahaan i pada tahun t

2. *Notional Value (HED)*

Menurut Graham dan Rogers dalam Nurhandono dan Firmansyah (2017) cara untuk mengukur lindung nilai adalah dengan menggunakan total nilai nosional dari instrumen lindung nilai dengan skala nilai aset tahun sebelumnya (t-1). Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$HED = \frac{\text{Total Notional Value } it}{\text{Lagged Asset } it-1}$$

Penjelasan:

HED_{it} = Kepemilikan Lindung Nilai perusahaan i pada tahun t

Total Notional Value _{it} = Total nilai nosional perusahaan i tahun t

Lagged Asset _{it-1} = Nilai aset perusahaan i pada tahun t-1

3. *Foreign Currency Hedge (FXHEDGE_{Ext})*

Menurut Mackay dan Moeller dalam Frensidy dan Mardhaniaty (2019) menggunakan FXHEDGE_{Ext} untuk mengukur lindung nilai terhadap mata uang asing, yaitu implementasi lindung nilai dengan menggunakan instrumen derivatif untuk risiko nilai tukar mata uang.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$FXHEDGE_{Ext} \text{ } it = \frac{\text{Total Notional Value (FX) } it}{\text{Total Asset } it}$$

Penjelasan:

$FXHEDGE_{it}$ = Kepemilikan Lindung Nilai untuk risiko nilai tukar perusahaan i pada tahun t

$Total\ Notional$ = Total nilai nosional untuk risiko nilai tukar

$Value\ (FX)_{it}$ perusahaan i tahun t

$Total\ Asset_{it}$ = Nilai aset perusahaan I pada tahun t

4. Likuiditas Valuta Asing (LVA)

Pengukuran lindung nilai menurut Situmeang dan Wiagustini (2018) menggunakan proksi likuiditas valuta asing (valas) merujuk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank yaitu perbandingan total aset valuta asing terhadap kewajiban valuta asing. Sesuai Pasal 4 ayat 2 PBI No.16/21/PBI/2014, sebagai bentuk lindung nilai, perusahaan diwajibkan untuk memiliki rasio likuiditas valuta asing paling rendah sebesar 70%.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Likuiditas\ Valas_{it} = \frac{Aset\ Valas_{it}}{Kewajiban\ Valas_{it}}$$

Penjelasan:

$Likuiditas\ Valas_{it}$ = Likuiditas Valas perusahaan i pada tahun t

$Aset\ Valas_{it}$ = Aset Valuta Asing perusahaan i tahun t

$Kewajiban\ Valas_{it}$ = Kewajiban Valuta Asing perusahaan i pada tahun t

Berdasarkan beberapa proksi pengukuran lindung nilai yang ada penelitian ini dilakukan menggunakan likuiditas valuta asing, karena merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan telah diatur secara resmi oleh pemerintah. Untuk pelaksanaan lindung nilai berdasarkan PBI No.16/21/PBI/2014 secara rinci dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.16/24/DKEM tentang Penerapan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Yang dimaksud dengan aset valuta asing dalam poin I.A.1 Surat Edaran Bank Indonesia No.16/24/DKEM tentang Penerapan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank adalah:

“aset valuta terdiri atas kas, giro, tabungan, deposito, piutang, persediaan, surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan (*marketable securities*), dan tagihan yang berasal dari transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option* dalam valuta asing yang dihitung berdasarkan posisi pada akhir triwulan.”

Sedangkan yang dimaksud kewajiban valuta asing dalam poin I.B.1 Surat Edaran Bank Indonesia No.16/24/DKEM tentang Penerapan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank adalah:

“kewajiban valuta asing merupakan seluruh kewajiban valuta asing kepada penduduk maupun bukan penduduk termasuk kewajiban yang berasal dari transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option* yang akan jatuh waktu:

- a. sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan/atau
- b. lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.”

Dalam laporan keuangan, aset dan kewajiban valas sebagaimana dijelaskan di atas diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban lancar, hal ini dijelaskan dalam PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (2009:01.21), yaitu suatu aset dikategorikan lancar jika: “...entitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam

jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.” Sedangkan dalam PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (2009:01.24) suatu kewajiban dikatakan lancar jika :

“...kewajiban lancar/liabilitas jangka pendek diklasifikasikan jika liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.”

2.1.2.3.1 Likuiditas Valuta Asing

Menurut Sartono (2008:116), “likuiditas menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya.”

Menurut Subramanyam (2012:43), “likuiditas adalah untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek.”

Menurut Horne dan Wachowicz (2012:205), likuiditas adalah:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek (aktiva lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut.

Menurut Kasmir (2017:129), likuiditas adalah:

“Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu memenuhi utang (membayar) tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.”

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan sumber daya (aktiva lancar) yang tersedia.

Sedangkan yang dimaksud dengan valuta asing menurut Hadi (1997:15), adalah:

“Mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.”

Menurut Joesoef (2008:4), valuta asing adalah mata uang asing atau alat pembayaran luar negeri.

Menurut Sadono Sukirno dalam Hasoloan (2014;193) menjelaskan:

“kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang asing suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang asing. Artinya kurs valuta asing merupakan representasi jumlah uang domestik yang dibutuhkan, misalnya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu dollar Singapura atau ringgit Malaysia.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa valuta asing adalah nilai domestik yang dibutuhkan untuk mendapatkan mata uang negara lain.

Menurut Pasal 1 PBI No.16/21/PBI/2014 likuiditas valuta asing adalah “rasio aset valuta asing terhadap kewajiban valuta asing.”

Menurut Mathisen dan Billmeier (2006:16), likuiditas valuta asing adalah: *“Foreign-Exchange Liquidity are analyzed by comparing short-term external debt to the level of official foreign currency.”*

Jika diartikan likuiditas valuta asing dianalisa dengan membandingkan kewajiban jangka pendek eksternal dengan tingkat mata uang resmi.

Sedangkan Levi (315:2005) menjelaskan bahwa likuiditas valuta asing merupakan:

“Liquidity considerations argue in favor of keepin funds in the currency in which they are most likely to be needed in the future. This might not be the currency in which funds arrive or the company’s home currency.”

Jika diterjemahkan maka pertimbangan atas likuiditas yang diperlukan dalam rangka menjaga dana dalam mata uang yang akan dibutuhkan dimasa depan. Dana yang dibutuhkan tersebut belum tentu berasal dari sumber dana muncul atau mata uang asal negara perusahaan. Dengan demikian salah satu fungsi dari likuiditas valuta asing adalah menjaga kebutuhan perusahaan dimasa mendatang, diantaranya dapat berupa pemenuhan pembayaran kewajiban dalam valuta asing.

Menurut beberapa definisi dan penjelasan mengenai likuiditas valuta asing dapat disimpulkan bahwa likuiditas valuta asing merupakan suatu gambaran bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atas transaksi mata uang asing dengan menggunakan aktiva lancar dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan.

2.1.2.3.2 Aset Valuta Asing

Aset valuta asing terdiri dari 2 objek yaitu aset dan valuta asing, adapun dari aset dan valuta asing adalah sebagai berikut:

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:19), aset adalah:

“Sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.”

Sedangkan Kieso, et. al. (2008:40) menjelaskan aktiva adalah:

“Manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh sebuah entitas sebagai hasil dari transaksi-transaksi atau kewajiban-kewajiban masa lalu.”

Aktiva (*assets*) merupakan salah satu elemen pada neraca dalam perusahaan. Pengertian aktiva menurut Al, Haryono Jusup (2012:28) adalah :

“... sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang”.

Menurut Siregar (2004:178) pengertian aset adalah:

“Barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang memiliki nilai guna atau ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh suatu badan usaha, instansi atau perorangan.”

Selanjutnya pengertian aktiva menurut Sugiri (2009:137) menyatakan bahwa aktiva atau aset adalah:

“...kekayaan yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan pada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aset merupakan suatu manfaat ekonomi di masa mendatang yang dapat diukur dengan uang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.

Aset sendiri dibagi menjadi 2 kategori, Walter T. Harisson jr. et.al. yang diahlibahasakan oleh Gina Gania (2013:20) menjelaskan dua kategori aset yang utama, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar.

Dalam perhitungan likuiditas, aset yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan adalah aktiva (aset) lancarnya. Adapun pengertian mengenai aset lancar menurut Walter T. Harisson Jr. et. al. yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:20) aset lancar adalah:

“...aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi selama 12 bulan ke depan atau dalam siklus operasi bisnis. Aset lancar pada umumnya meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang (juga disebut debitor), persediaan barang dagang, dan beban dibayar di muka.”

Menurut Kasmir (2012:134) pengertian Aktiva lancar adalah:

“...harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun). Komponen aktiva lancar meliputi kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang diberikan, dan aktiva lancar lainnya.”

Wien's Anorga (2009:265) yang dimaksud aktiva lancar yaitu: “aktiva yang dengan mudah dijadikan uang.”

Aktiva lancar menurut Munawir (2010:14) adalah:

“Uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan normal).”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa aset lancar adalah harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat, paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan normal, komponen dari aset lancar antara lain kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang diberikan, dan aktiva lancar lainnya

Sedangkan untuk pengertian valuta asing telah dibahas sebelumnya dalam poin 2.1.2.3.1. Jika disimpulkan dapat diartikan bahwa valuta asing merupakan, nilai domestik yang dibutuhkan untuk mendapatkan mata uang negara lain.

Adapun pengertian gabungan dari aset valuta asing Sadiqin (2019:106) aset valuta asing merupakan aset yang “...dinyatakan dalam denominasi mata uang tertentu jika jumlahnya selalu disebut dalam mata uang tersebut.”

Mishkin (2009:116) menjelaskan mengenai aset domestik dan aset mata uang asing sebagai berikut:

“Aset domestik terdiri dari deposito bank, obligasi, saham, dan lain lain, yang didenominasikan dalam mata uang domestik, sedangkan aset luar negeri merupakan aset serupa dengan denominasi mata uang asing.”

Dalam poin I.A.1 Surat Edaran Bank Indonesia No.16/24/DKEM tentang Penerapan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank adalah:

“aset valuta terdiri atas kas, giro, tabungan, deposito, piutang, persediaan, surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan (*marketable securities*), dan tagihan yang berasal dari transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option* dalam valuta asing yang dihitung berdasarkan posisi pada akhir triwulan.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa aset valuta asing merupakan suatu manfaat ekonomi di masa mendatang yang dapat diukur dengan uang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, manfaat ekonomi tersebut secara khusus diukur menggunakan nilai mata uang domestik yang setara dengan nilai mata uang negara lain. Untuk kepentingan perhitungan likuiditas valuta asing berdasarkan PBI No.16/21/PBI/2014, aset valuta asing yang dimaksud adalah aset valuta asing berdasarkan posisi akhir triwulan, dalam

laporan keuangan aset valuta asing tersebut termasuk dalam kategori lancar sebagaimana telah dijelaskan dalam PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (2009:01.21).

2.1.2.3.3 Kewajiban Valuta Asing

Menurut Hery (2015:194), utang (liabilities) merupakan:

“...kewajiban perusahaan kepada kreditor (supplier, bankir) dan pihak lainnya (karyawan, pemerintah). Kreditor dan pihak lainnya di sini memiliki hak/klaim/tuntutan atas aset perusahaan”.

Pengertian utang menurut Kieso et. Al (2008:189) utang adalah:

“Kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini atas entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Suatu hal dapat dikategorikan sebagai sebuah kewajiban apabila memenuhi tiga karakteristik utama, yang pertama merupakan kewajiban saat ini yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan transfer masa depan atau penggunaan kas, barang, atau jasa. Yang kedua, merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari. Dan yang terakhir, transaksi atau kejadian lainnya yang menciptakan kewajiban itu harus telah terjadi di masa lalu.”

Menurut Mamduh M. Hanafi (2016:29), yang dimaksud dengan utang adalah:

“...pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Utang muncul terutama karena penundaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari dana yang dipinjam.”

Menurut Fahmi (2013: 163), jenis utang dibagi menjadi dua:

1. “*Short-term liabilities* (utang jangka pendek) sering disebut juga dengan utang lancar (*current liabilities*). Penegasan utang lancar karena sumber utang jangka pendek dipakai untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas perusahaan yang segera dan tidak bisa ditunda. Utang jangka pendek ini umumnya harus dikembalikan kurang dari satu tahun.
2. *Long-term liabilities* (utang jangka panjang) sering disebut utang tidak lancar (*non current liabilities*). Penyebutan utang tidak lancar karena dana yang dipakai dari sumber utang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Alokasi pembiayaan jangka panjang biasanya bersifat *tangible asset* (aset yang bisa disentuh), dan memiliki nilai jual yang tinggi jika suatu saat dijual kembali. Karena itu penggunaan dana utang jangka panjang ini dipakai untuk kebutuhan jangka panjang, seperti pembangunan pabrik, pembelian tanah dan gedung, dan lain-lain.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa utang merupakan suatu pengorbanan ekonomis yang akan timbul di masa mendatang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain dimasa mendatang, sebagai akibat dari kejadian masa lalu. Dalam perhitungan likuiditas, kewajiban yang diperhitungkan untuk mengukur kemampuan perusahaan adalah kewajiban jangka pendek.

Sedangkan untuk pengertian valuta asing telah dibahas sebelumnya dalam poin 2.1.2.3.1. Jika disimpulkan dapat diartikan bahwa valuta asing merupakan, nilai domestik yang dibutuhkan untuk mendapatkan mata uang negara lain.

Menurut Ismanthono (2010;206) menjelaskan kewajiban valuta asing merupakan “utang dalam valuta asing dengan masa jatuh tempo sampai dengan satu tahun.”

Waluyo (2008:161) menjelaskan kewajiban valuta asing berdasarkan sumber terjadinya, yaitu:

“Transaksi mata uang asing dengan memperhatikan sumber terjadinya yang meliputi:

1. Utang Dagang
Timbul sebagai akibat kredit impor, baik untuk barang dagangan maupun pembelian barang modal.
2. Utang Jasa
Timbul sebagai akibat struktur permodalan perusahaan yang sebagian dibiayai dengan pinjaman luar negeri dalam valuta asing baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Utang Bunga Pinjaman
Timbul sebagai akibat pinjaman valuta asing.”

dalam poin I.B.1 Surat Edaran Bank Indonesia No.16/24/DKEM tentang Penerapan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank adalah:

“kewajiban valuta asing merupakan seluruh kewajiban valuta asing kepada penduduk maupun bukan penduduk termasuk kewajiban yang berasal dari transaksi forward, swap, dan/atau option yang akan jatuh waktu:

- a. sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan/atau
- b. lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban valuta asing merupakan suatu pengorbanan ekonomi yang akan timbul dimasa mendatang yang dapat diukur dalam mata uang asing sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.

Dalam pengukuran likuiditas valuta asing, kewajiban valuta asing yang digunakan, dapat dilihat dalam laporan keuangan pada bagian lancar kewajiban perusahaan dalam mata uang asing. Hal ini dikarenakan kewajiban valuta asing untuk pengukuran likuiditas valuta asing dikategorikan sebagai kewajiban yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun sebagaimana telah diatur dalam PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (2009:01.24). Adapun contoh kewajiban valuta asing adalah utang dagang atas impor barang, utang jasa yang

dibiayai dengan pinjaman luar negeri dalam valuta asing, dan utang bunga pinjaman yang timbul akibat pinjaman valuta asing.

2.1.3 *Leverage*

2.1.3.1. Pengertian *Leverage*

Kasmir (2017:151) menyebutkan bahwa Rasio *Leverage* adalah sebagai berikut:

“Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.”

Andhari & Sukartha dalam Rogate & Sofie (2018) menjelaskan:

“*leverage* merupakan rasio yang menandakan seberapa besar perusahaan menggunakan modal eksternal yaitu utang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.”

Menurut Sujarweni (2017:61) menyebutkan bahwa rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

“Rasio ini digunakan mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sumber daya yang dimaksud seperti piutang dan modal maupun aktiva.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, sehingga dapat ditentukan berapa besar beban utang yang harus ditanggung oleh

perusahaan serta risiko atas tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (kreditur). Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki.

2.1.3.2. Manfaat *Leverage*

Menurut Kasmir (2017:153) Tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* yaitu:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.
8. Tujuan lainnya.”

Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antar nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.
8. Manfaat lainnya.”

Dari beberapa tujuan dan manfaat yang telah dijelaskan *leverage* memiliki tujuan yang bermacam-macam terutama sebagai alat perusahaan untuk mengukur sejauh mana tingkat utang yang efektif yang dapat digunakan oleh perusahaan sesuai dengan tujuannya masing-masing.

2.1.3.3. Pengukuran Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2016:115) secara umum terdapat 5 (lima) jenis rasio *leverage* yang sering digunakan oleh perusahaan, yaitu *Debt to Total Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Long-term Debt to Equity Ratio* (LTDtER), *Time Interest Earned Ratio*, dan *Fixed Charge Coverage Ratio* (FCC).

1. “*Debt to Total Asset Ratio* (DAR)”

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusan untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Asset}}$$

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri untuk dijadikan jaminan utang.

Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

3. *Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari seriap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan perusahaan.

Rumusan untuk mencari *long term debt to equity ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu:

$$LTDtER = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Total Equity}}$$

4. *Time Interest Earned Ratio*

Time interest earned ratio merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menutupi tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya.

Rumus untuk mencari *times interest earned ratio* dapat digunakan dua cara sebagai berikut:

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax}}{\text{Interest Expense}}$$

atau

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{EBT} + \text{Interest Expense}}{\text{Interest Expense}}$$

5. *Fixed Charge Coverage Ratio (FCC)*

Fixed Charge Coverage Ratio atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *times interest earned ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*).

Rumusan untuk mencari *Fixed charge coverage* adalah sebagai berikut: “

$$FCC = \frac{\text{EBIT} + \text{Interest Expense} + \text{Lease Contract}}{\text{Interest Expense} + \text{Lease Contract}}$$

Dalam Penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dikarenakan rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai baik tidaknya penggunaan utang terhadap rentabilitas modal, seperti dijelaskan oleh Sugiono (2009:71):

“Rasio ini merupakan salah satu rasio penting karena berkaitan dengan masalah *trading on equiy*, yang dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap rentabilitas modal sendiri dan perusahaan tersebut.”

Sedangkan untuk ketentuan tingkat *leverage* yang baik menurut Kasmir (2008:164) adalah:

“Semakin tinggi Debt to Equity Ratio (DER) maka akan menunjukkan kinerja yang kurang baik bagi perusahaan. Perusahaan secara umum harus berusaha DER bernilai rendah atau berada dibawah 200% atau 2.”

2.1.3.3.1 Debt to Equity Ratio

Pengertian *Debt to Equity Ratio* menurut Darsono dan Ashari (2010:54) yaitu:

“*Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan salah satu rasio *leverage* atau solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini juga disebut dengan rasio pengungkit (*Leverage*) yaitu menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang.”

Menurut Sugiyono (2009:71), menyatakan bahwa:

“Rasio ini menunjukkan perbandingan utang dan modal. Rasio ini merupakan salah satu rasio penting karena berkaitan dengan masalah *trading on equiy*, yang dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap rentabilitas modal sendiri dan perusahaan tersebut.”

Sedangkan menurut Kasmir (2017:157), menyatakan bahwa:

“*Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio *debt to equity* (DER) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah modal. Penggunaan DER dapat menunjukkan seberapa kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban dimasa mendatang, selain itu rasio ini juga dapat menjadi perbandingan seberapa besar dana pihak internal dan eksternal yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.

2.1.3.3.2 Pengertian Utang

Menurut Hery (2015:194), utang (*liabilities*) merupakan:

“...kewajiban perusahaan kepada kreditor (supplier, bankir) dan pihak lainnya (karyawan, pemerintah). Kreditor dan pihak lainnya di sini memiliki hak/klaim/tuntutan atas aset perusahaan”.

Pengertian utang menurut Kieso et. Al (2008:189) utang adalah:

“Kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini atas entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Suatu hal dapat dikategorikan sebagai sebuah kewajiban apabila memenuhi tiga karakteristik utama, yang pertama merupakan kewajiban saat ini yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan transfer masa depan atau penggunaan kas, barang, atau jasa. Yang kedua, merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari. Dan yang terakhir, transaksi atau kejadian lainnya yang menciptakan kewajiban itu harus telah terjadi di masa lalu.”

Sedangkan Mamduh M Hanafi (2016:29), utang adalah:

“... pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Utang muncul terutama karena penundaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari dana yang dipinjam.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa utang merupakan suatu pengorbanan ekonomis yang akan timbul di masa mendatang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang, sebagai akibat dari kejadian masa lalu.

2.1.3.3 Klasifikasi Utang

Kieso et. al. (2008:188), menjelaskan bahwa utang atau kewajiban dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kewajiban Lancar (Utang Jangka Pendek)

Menurut Kieso et. al. (2008:188) menjelaskan:

“utang lancar merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar. Jangka waktu utang lancar adalah maksimal satu tahun. Oleh karena itu, utang lancar disebut juga utang jangka pendek. Komponen utang lancar menurut antar lain terdiri dari:

a. Utang usaha

Utang usaha adalah saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang, atau jasa yang dibeli secara kredit. Utang jenis ini muncul karena adanya kesenjangan waktu antara penerimaan jasa atau akuisisi hak aktiva dan pembayaran atas aktiva tersebut.

b. Wesel bayar

Definisi dari wesel bayar adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal tertentu di masa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi dengan bentuk lainnya. Utang jenis ini diperlukan sebagai bagian dari transaksi pembelian atau penjualan sebagai pengganti perluasan kredit yang normal atau kredit lisan, sementara wesel bayar kepada bank berasal dari pinjaman kas atau uang tunai. Wesel bayar dapat diklasifikasikan menjadi wesel jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan periode pelunasannya, dan

diklasifikasikan menjadi wesel berbunga dan tanpa bunga berdasarkan unsur bunga yang melekat pada wesel tersebut.

- c. Jatuh tempo berjalan utang jangka panjang
Contoh dari jatuh tempo saat ini utang jangka panjang adalah obligasi, wesel hipotik, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Utang jangka panjang tidak dicatat ketika akan jatuh tempo saat ini sebagai kewajiban lancar apabila akan ditarik atau dilunasi dengan aktiva yang terakumulasi untuk tujuan tersebut yang tidak ditunjukkan sebagai aktiva lancar, dan apabila akan didanai kembali atau dilunasi dari hasil penerbitan utang baru atau dikonversi menjadi modal saham.
- d. Kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan didanai kembali
Kewajiban dengan jangka waktu yang pendek adalah jenis utang yang telah pasti akan jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun setelah tanggal neraca perusahaan atau dalam siklus operasi perusahaan, tergantung mana yang lebih lama dan biasanya sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- e. Utang dividen
Utang dividen memiliki pengertian sebagai jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi dewan komisaris atau direksi. Pada tanggal pengumuman, perusahaan menempatkan pemegang saham sebagai kreditor atas sejumlah dividen. Dividen digolongkan menjadi kewajiban lancar karena dividen akan dibayar pada satu tahun berikutnya setelah pengumuman kepada para pemegang saham. Sementara itu, dividen saham preferen kumulatif yang belum diumumkan juga dianggap sebagai kewajiban lancar karena dividen yang tertunggak tersebut bukan merupakan kewajiban, sampai dewan direksi mengambil tindakan mengotorisasi pembagian laba perusahaan.
- f. Utang muka pelanggan dan deposito yang dapat dikembalikan
Perusahaan dapat menerima deposito dari pelanggan maupun dari karyawannya sendiri. Perusahaan menerima deposito dari pelanggan untuk menjamin pembayaran kewajiban yang diharapkan dimasa depan dan juga sebagai jaminan untuk kemungkinan kerusakan barang yang ada di tangan pelanggan. Sementara perusahaan menerima deposito dari karyawan atas jaminan dan pengembalian property perusahaan yang digunakan oleh karyawan yang membantu kegiatan operasional karyawan tersebut. Klasifikasi pos-pos tersebut sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar bergantung pada waktu antara tanggal deposito dan pemutusan hubungan yang mensyaratkan deposito.
- g. Utang pajak penjualan
Perusahaan baik dengan dan tanpa perantara dalam penjualannya, harus menagih pajak penjualan atas transfer produk dan atas jasa-jasa tertentu harus ditagih dari pelanggan dan diserahkan kepada pemerintah berupa pajak. Akun utang pajak penjualan harus merefleksikan kewajiban untuk pajak penjualan yang terutang kepada pemerintah. Terkadang penagihan pajak penjualan yang dikreditkan ke kewajiban tidak sama dengan kewajiban yang dihitung oleh ketentuan yang berlaku di pemerintah,

dalam hal ini dirjen pajak. Sehingga perlu dibuat penyesuaian atas akun kewajiban dengan mengakui keuntungan atau kerugian atas penagihan pajak penjualan.

- h. Utang pajak penghasilan
Untuk menghitung utang pajak penghasilan yang dihasilkan dari operasi periode berjalan, perusahaan harus mempersiapkan SPT pajak penghasilan terlebih dahulu. Utang pajak atas laba perusahaan, seperti yang dihitung per SPT pajak harus diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Perusahaan harus membayar pajak periodik kepada bank yang diotorisasi sepanjang tahun. Pembayaran tersebut didasarkan pada estimasi total kewajiban pajak tahunan.
- i. Pendapatan diterima dimuka
Pendapatan diterima dimuka adalah kondisi dimana perusahaan menerima kas sebagai pembayaran hasil perdagangan maupun jasa dari pelanggan sebelum melakukan pertukaran barang atau melakukan jasa tertentu dan hak kepemilikan belum didapat pelanggan namun sudah dicatat sebagai pendapatan oleh perusahaan.
- j. Kewajiban yang berhubungan dengan karyawan
Jumlah yang terutang kepada karyawan untuk gaji dan upah pada akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai kewajiban lancar.”

2. Kewajiban Tidak Lancar/Utang Jangka Panjang

Komponen yang ada dalam utang jangka panjang menurut Kieso, et. al

(2008:204) terdiri dari:

- a. “Obligasi
Obligasi adalah surat tanda bukti utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegangnya dengan imbalan bunga sejumlah tertentu. Dalam setiap obligasi tertera nilai nominal obligasi serta tingkat bunga obligasi. Nilai nominal atau nilai pari adalah nilai yang menunjukkan jumlah yang harus dibayar perusahaan pada waktu obligasi jatuh tempo. Sedangkan tingkat bunga obligasi menunjukkan sejumlah prosentase tertentu yang harus dibayarkan secara periodik kepada pemegang obligasi. Perusahaan menerbitkan obligasi biasanya disebabkan oleh kebutuhan dana dalam jumlah besar yang tidak bisa dipenuhi dari akumulasi laba ditahan maupun dari utang bank. Karena obligasi ini memiliki masa jatuh tempo yang lebih dari satu tahun (biasanya antara 5 sampai dengan 20 tahun), maka apabila perusahaan menerbitkan obligasi akan menimbulkan utang obligasi.
- b. Wesel Bayar Jangka Panjang,
Wesel bayar jangka panjang merupakan utang wesel yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu periode akuntansi. Perusahaan biasanya menerbitkan wesel bayar jangka panjang apabila membutuhkan dana dalam jumlah besar atau melakukan pembelian yang tidak bisa dibayar langsung tetapi melalui pembayaran angsuran.

c. **Wesel Bayar Hipotik**

Wesel bayar hipotik adalah wesel yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotik yang menggadaikan hak atas properti sebagai suatu jaminan pinjaman. Wesel bayar hipotik lebih sering digunakan oleh perusahaan perorangan dan persekutuan daripada korporasi. Peminjam biasanya menerima kas dalam jumlah nominal wesel hipotik, dimana jumlah nominal wesel tersebut merupakan kewajiban yang sebenarnya dan tidak ada diskonto atau premi yang terlibat.”

2.1.3.3.4 Ekuitas atau Modal

Menurut Kasmir (2017:311), modal adalah:

“... hak yang dimiliki perusahaan, komponen modal yang terdiri dari: modal, setor, agio saham, laba ditahan, cadangan laba, dan lainnya”.

Menurut Munawir (2007:19) modal adalah :

“... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), laba ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh utang-utangnya”.

Sedangkan menurut Irawati (2006:7) modal adalah “... kumpulan barang-barang, yaitu semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa modal merupakan bagian dari pemilik perusahaan yang menunjukkan kekayaan dari pemiliknya, modal dapat berupa modal disetor, agio saham, laba ditahan, cadangan laba, dan lainnya.

2.1.3.3.5 Sumber Modal

Untuk memenuhi kebutuhan aktifitas sehari-harinya serta untuk pengembangan usaha, perusahaan perlu memiliki beberapa sumber modal dan

tidak berpatokan pada satu sumber saja baik itu dari internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan. Menurut Riyanto (2001:209), sumber modal terdiri:

1. “Sumber Intern (*Internal Sources*), adalah modal yang dihasilkan dari dalam perusahaan. Sumber intern dapat berasal dari laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Besarnya laba yang dimasukkan ke dalam cadangan atau ditahan, tergantung besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu dan tergantung kepada kebijakan dividen perusahaan tersebut. Sedangkan akumulasi penyusutan dapat dibentuk dari penyusutan, tiap tahunnya, tergantung metode penyusutan yang dipakai oleh perusahaan tersebut.
2. Sumber Ekstern (*External Sources*), adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur atau pemegang saham yang merupakan bagian dalam perusahaan.”

2.1.3.3.6 Jenis-Jenis Modal

Menurut Riyanto (2010 : 227) jenis-jenis modal terdiri dari:

1. “Modal Asing / Utang
Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan. Bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang harus dibayar kembali pada saatnya. Modal asing sering dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
 - a. Modal Asing/ Utang Jangka Pendek (*Short-term debt*), yaitu yang jangka waktunya pendek, kurang dari 1 (satu) tahun.
 - b. Modal Asing/ Utang Jangka Menengah (*Intermediate-term debt*), yaitu yang jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun.
 - c. Modal Asing/ Utang Jangka Panjang (*Long-term debt*), yaitu yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun.
2. Modal Sendiri
Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu tertentu. Modal sendiri yang berasal dari sumber intern ialah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan, sedangkan yang berasal dari sumber ekstern ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan.”

2.1.4 Manajemen Laba

2.1.4.1 Pengertian Manajemen

Manajemen Laba terdiri dari 2 kata yaitu manajemen dan laba. Menurut Sudarwan dan Yunan Danim (2010:18) mengemukakan bahwa:

“Manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu.”

Menurut Handoko (1997: 8) menjelaskan manajemen sebagai berikut:

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”

Sedangkan menurut George R. Terry dalam Sukarna (2011:3), menyatakan bahwa “*management is the accomplishing of a predeternined objectives through the efforts of other people.*” Jika diartikan, manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan yang dilakukan melalui atau bersama-sama orang lain serta menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi.

2.1.4.2 Pengertian Laba

Sedangkan laba menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005:25) adalah sebagai berikut:

“Laba (*earnings*) atau laba bersih (*net income*) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat.”

Samryn (2012:429), menyatakan bahwa pengertian laba adalah sebagai berikut:

“Laba merupakan sumber dana internal yang dapat diperoleh dari aktivitas normal perusahaan yang tidak membutuhkan biaya ekstra untuk penyimpanan dan penggunaannya”.

Sedangkan menurut Greuning et. al., (2013:39) menyatakan bahwa laba adalah jumlah yang dapat diberikan kepada semua pemegang saham biasa dari induk (yang memiliki kendali maupun tidak).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laba adalah suatu jumlah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas normal perusahaan yang dapat diberikan kepada para pemegang saham.

2.1.4.3 Pengertian Manajemen Laba

Jika ditarik pengertian manajemen laba secara utuh, Scott (2006:344) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

“Earnings management is the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective.”

Jika diterjemahkan berarti Manajemen Laba adalah pilihan yang dilakukan oleh manager terkait kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu.

Definisi manajemen laba menurut Martani, et. al. (2012:113) yaitu:

“Manajemen laba merupakan tindakan yang mengatur waktu pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian agar mencapai

informasi laba tertentu yang diinginkan, tanpa melanggar ketentuan di standar akuntansi. Biasanya manajemen laba dilakukan dalam bentuk menaikkan laba untuk mencapai target laba tertentu dan juga dalam bentuk menurunkan laba di periode ini, agar dapat menaikkan pendapatan di periode mendatang.”

Menurut Sulistyanto (2008:6) pengertian manajemen laba adalah:

“Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan yang disajikan dengan cara mengatur waktu pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian untuk tujuan tertentu.

Tujuan tersebut diantaranya untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja perusahaan sehingga kinerja perusahaan terlihat baik, ataupun dengan menurunkan laba perusahaan sehingga perusahaan dapat terhindar dari kewajiban membayar pajak yang tinggi.

2.1.4.4. Motivasi Manajemen Laba

Tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen dilatarbelakangi karena beberapa motivasi, menurut Watts dan Zimmerman dalam Sulistyanto (2008:44), diantaranya:

1. *“Bonus plan hypothesis*

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa *“managers of firms with bonus plan are more likely to use accounting methods that increase current period reported income.”* Ada bukti empiris yang menyatakan bahwa perjanjian (kontrak) bisnis manajer dengan pihak lain merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Ada variable yang

selama diuji berkaitan dengan perjanjian bisnis itu, yaitu bonus atau kompensasi manajerial (bonus or managerial compensation). Dalam bonus atau kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus. Seandainya pada tahun tertentu kinerja sesungguhnya berada di bawah syarat untuk memperoleh bonus, maka manajer akan melakukan manajemen laba agar labanya dapat mencapai tingkat minimal untuk memperoleh bonus. Sebaliknya, jika pada tahun itu kinerja yang diperoleh manajer jauh di atas jumlah yang disyaratkan untuk memperoleh bonus, manajer akan mengelola dan mengatur agar laba yang dilaporkan (reported earnings) menjadi tidak terlalu tinggi. Kelebihan laba sesungguhnya dengan laba yang dilaporkan akan disajikan pada tahun berikutnya. Upaya ini membuat manajer cenderung akan selalu memperoleh bonus dari periode ke periode. Akibatnya, pemilik perusahaan terpaksa harus kehilangan sebagian dari kesejahteraannya yang dibagikan kepada manajer sebagai bonus.

2. *Debt (equity) hypothesis*

Debt (equity) hypothesis yang menyatakan bahwa “*the larger the firms debt to equity ratio, the more likely managers use accounting methods that increase income*”. Dalam konteks perjanjian utang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban utangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban utangnya. Manajer akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikannya pada periode-periode mendatang. Upaya seperti ini dilakukan agar perusahaan dapat menggunakan dana itu untuk keperluan lainnya. Walau sebenarnya hanya masalah waktu pengakuan (timing) kewajiban, hal ini telah mengakibatkan pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya akan memperoleh dan menggunakan informasi yang keliru. Akibatnya, pihak-pihak ini membuat keputusan bisnis yang keliru pula.

3. *Political cost hypothesis*

Political cost hypothesis yang menyatakan bahwa “*larger firms rather than small firms are more likely to use accounting choices that reduce reported profits*”. Alasan terakhir adalah masalah pelanggaran regulasi pemerintah. Sejauh ini beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, misalkan undang-undang perpajakan, *anti-trust*, dan monopoli, dan sebagainya. Undang-undang mengatur jumlah pajak yang akan

ditarik perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Dengan kata lain, besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba bersih besar akan ditarik pajak yang lebih besar pula dan perusahaan yang memperoleh laba lebih kecil akan ditarik pajak yang lebih kecil pula. Kondisi inilah yang merangsang manajer untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkannya menjadi tidak terlalu tinggi, karena manajer, sebagai pengelola, tentu tidak ingin kewajiban yang harus diselesaikannya terlalu membebaninya. Hal ini sangat mudah dilakukan perusahaan, yaitu dengan menarik biaya periode yang akan datang menjadi biaya periode berjalan, dan sebaliknya mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode yang akan datang. Upaya lain yang dilakukan perusahaan untuk menghemat pajak adalah dengan mempermainkan laba pada saat ada pergantian peraturan perundang-undangan yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah di masa depan. Perusahaan menunda pengakuan laba periode berjalan dan baru akan diakui pada saat peraturan yang baru itu diperlakukan secara efektif.”

2.1.4.5. Bentuk-Bentuk Manajemen Laba

Bentuk–bentuk manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott (2006:345), meliputi:

1. *“Taking a bath* (tekanan dalam organisasi)
Disebut juga *big baths*, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya –biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi yang tidak menguntungkan bisa dihindari. Akibatnya, laba periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan.
2. *Income minimization* (meminimumkan laba)
Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau motif meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan (*write off*) atas barang –barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset, dan pengembangan yang cepat.
3. *Income maximization* (memaksimalkan laba)
Memaksimalkan laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang (*debt covenant*).

4. *Income smoothing* (perataan laba)
Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis.
5. *Timing revenue dan expenses recognition* (pengakuan pendapatan dan beban) Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan *premature* atas pendapatan.”

2.1.4.6. Teknik Manajemen Laba

Teknik dan pola manajemen laba menurut Dedhy Sulistiawan et. al.

(2011:42) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. “Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi
Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment(perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain –lain.
2. Mengubah metode akuntansi
Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan
Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/ menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.”

Menurut Sulistyanto (2008:34) ada empat cara yang digunakan

manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu:

1. “Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih. Upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapatan periode berjalan.
2. Mencatat pendapatan palsu. Upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi

sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapan pun.

3. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat dan lambat. Upaya ini dapat dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan
4. Tidak mengungkapkan semua kewajiban. Upaya ini dilakukan manajer dengan menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya”.

2.1.4.7. Pengukuran Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008:211) ada beberapa model untuk pendeteksi manajemen laba yaitu dengan model pemisahan akrual;

- “1. *The healy model*.
2. *The de angelo model*.
3. *The jones model*.
4. *The modified jones model*.”

Adapun penjelasan mengenai model tersebut antara lain:

1. “*Model Healy*”

Model empiris untuk mendeteksi manajemen laba pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih pendapatan bersih (net income) dengan arus kas operasi untuk setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Langkah II: menghitung nilai *non discretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TA}{T}$$

Keterangan:

NDA = *Non discretionary accruals*.

TAC = Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode t-1

T = 1, 2, T merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.

t = Tahun *subscript* yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi.

Langkah III: menghitung nilai (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

2. De Angelo Model

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh De Angelo pada tahun 1986.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Langkah II: menghitung nilai *non discretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TAC}{TA_{t-1}}$$

Keterangan :

NDA_t = *Discretionary accruals* yang diestimasi.

TAC_t = Total akrual periode t .

TA_{t-1} = Total aktiva periode $t-1$.

Langkah III : menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *non discretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

3. The Jones Model

Jones (1991) mengajukan model yang menolak asumsi bahwa *non discretionary accruals* adalah konstan.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Langkah II: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap TAC_{it}/TA_{it-1} sebagai variabel dependen serta, $1/TA_{it-1}$, $\Delta Sales_{it}/TA_{it-1}$, dan PPE_{it}/TA_{it-1} sebagai variabel independennya. Model ini mencoba mengontrol pengaruh perubahan keadaan ekonomi perusahaan pada *non discretionary accruals* sebagai berikut :

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = b_1 \frac{1}{TA_{it-1}} + b_2 \frac{\Delta Sales_{it}}{TA_{it-1}} + b_3 \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}}$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen yaitu b_1 , b_2 , dan b_3 yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *non discretionary accruals*.

$$NDA_t = b_1 \frac{1}{TA_{it-1}} + b_2 \frac{\Delta Sales_{it} - \Delta Rev}{TA_{it-1}} + b_3 \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}}$$

Keterangan :

ΔREV_t = *Revenue* pada tahun t dikurangi *revenue* pada tahun $t-1$ dibagi total aktiva tahun $t-1$

b_1 = *Estimated intercept* perusahaan i periode t

b_2, b_3 = Slope untuk perusahaan i periode t

PPE_{it} = Aktiva tetap (*Gross property, plant, and equipment*) perusahaan i periode t

TA_{it-1} = Total aktiva perusahaan i periode $t-1$

Langkah III: menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA).

4. *Modified Jones Model*

Cara perhitungan *modified jones model* adalah sebagai berikut:

1. Menghitung *Total Accrual* (TAC) yaitu laba bersih tahun t dikurangi arus kas operasi tahun t .

$$TAC = NI_{it} - CFO_{it}$$

Selanjutnya total akrual diestimasi dengan Ordinary Least Square dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

2. Dengan koefisien regresi sebagaimana di atas, maka *Non Discretionary Accrual* ditentukan sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rec_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

3. Terakhir untuk menentukan nilai *Discretionary Accrual* sebagai ukuran manajemen laba ditentukan sebagai berikut: “

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan:

DA_{it}	=	<i>Discretionary Accruals</i> perusahaan i dalam periode tahun t
NDA_{it}	=	<i>Nondiscretionary Accruals</i> perusahaan i dalam periode tahun t
TA_{it}	=	<i>Total Accrual</i> perusahaan i dalam periode tahun t
NI_{it}	=	<i>Laba bersih</i> perusahaan i dalam periode tahun t
CFO_{it}	=	<i>Arus kas dari aktivitas operasi</i> perusahaan i dalam periode tahun t
A_{it-1}	=	<i>Total aset</i> perusahaan i dalam periode tahun t
ΔRev_{it}	=	<i>Pendapatan</i> perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan pendapatan perusahaan i pada tahun t-1
ΔRec_{it}	=	<i>Piutang usaha</i> perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan piutang usaha perusahaan i pada tahun t-1
PPE_{it}	=	<i>Total aset tetap berwujud</i> perusahaan i dalam periode tahun t
ε	=	<i>Error</i>

Jika nilai DA positif maka perusahaan melakukan manajemen laba sedangkan jika $DA \leq 0$ maka tidak melakukan manajemen laba.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:226), menyatakan bahwa:

“*The Modified Jones Model* ini merupakan metode pendeteksian manajemen laba yang secara statistik paling baik dan lebih kuat dibandingkan dengan metode pendeteksian manajemen laba lainnya ”

2.1.4.7.1 *Discretionary Accrual*

Menurut Sulistiawan et.al. (2011:51) menyatakan:

“akrual diskresioner adalah akrual yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan manajemen, seperti pertimbangan tentang penentuan umur ekonomis aset tetap atau pertimbangan pemilihan metode depresiasi.”

Menurut Belkaoui (2007) dalam Alim (2009) menjelaskan akrual diskresioner adalah:

“akrual diskresioner (*discretionary accrual*) yaitu akrual yang timbul dari diskresi/keleluasaan yang dimiliki oleh manajemen untuk memilih metode, prinsip, dan estimasi.”

Menurut Sri Sulistyanto (2008:161), menjelaskan *discretionary accrual* sebagai berikut:

“*Discretionary accrual* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Ada beberapa metode yang bisa dipakai manajer perusahaan untuk merekayasa besar kecilnya *discretionary accrual* ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya, misalnya kebebasan menentukan estimasi presentase jumlah piutang tak tertagih, memilih metode penentuan jumlah persediaan, dan sebagainya.”

Berdasarkan penejelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Discretionary Accrual* adalah komponen akrual yang muncul atas kebebasan dalam penentuan kebijakan estimasi dan standar akuntansi yang digunakan oleh manajemen.

2.1.4.7.2 *Total Accrual*

Beberapa pengertian mengenai akrual antara lain, yaitu menurut Halim (2007:49) menjelaskan:

“Akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setra kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya”.

Menurut Hoesada (2016:78) menjelaskan bahwa:

“Basis Akrual merupakan basis akuntansi yang pendapatan diakui saat dihasilkan tanpa perlu memperhatikan penerimaan kas (dapat lebih dahulu, atau arus kas masuk tunai, atau belakangan atau pendapatan kredit), dan beban diakui saat terjadinya beban tanpa perlu memerhatikan pembayarannya (dibayar dimuka, biaya saat tunai, atau biaya timbul walau belum dibayar).”.

Sedangkan menurut Bastian (2005:123) basis akrual yaitu mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akrual adalah cara pencatatan dalam akuntansi yang mengakui pendapatan ataupun beban pada saat terjadinya peristiwa ekonomi bukan berdasarkan pada diterima atau diserahkannya kas, sedangkan yang dimaksud dengan total akrual adalah seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan cara pencatatan tersebut.

Menurut model jones yang modifikasi cara untuk mendapatkan nilai total akrual adalah sebagai berikut:

$$TAC = NI_{it} - CFO_{it}$$

Selanjutnya total akrual diestimasi dengan Ordinary Least Square dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

Keterangan:

TAC = Total Akrual

NI_{it} = Laba Bersih Perusahaan

CFO = Arus Kas Operasi

A = Total Aset

Rev = Pendapatan

Rec = Piutang

PPE = Aset Tetap (Property, Plant, and Equipment)

a. Laba Bersih

Greuning et al., (2013:39) menyatakan bahwa laba adalah jumlah yang dapat diberikan kepada semua pemegang saham biasa dari induk (yang memiliki kendali maupun tidak).

Menurut Kasmir (2017:303) menyatakan bahwa:

“Laba bersih (*Net Profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.”

Sedangkan menurut Henry Simamora (2013:46), laba bersih adalah:

“Laba bersih yang berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode waktu tertentu.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa laba bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya perusahaan yang terjadi dalam satu periode termasuk pajak.

b. Arus Kas Operasi

Menurut Kieso et all (2011:205) aktivitas operasi adalah:

“Operating activities involve the cash effects of transaction that enter into the determination of net income, such as cash receipt from sales of goods and service and cash payments to suppliers and employees to obtain supplies and to pay expenses.”

Jika diartikan adalah aktifitas operasi melibatkan efek kas dari transaksi yang menghasilkan laba bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa dan pembayaran kas kepada rekanan dan pegawai untuk mendapatkan persediaan dan membayar beban.

Menurut Thomas R. Robinson, et all (2009:217), aktivitas operasi adalah:

”Operating activities include the company’s day-to-day activities that create revenues, such as selling inventory and providing services. Cash inflows result from cash sales and from collection of accounts receivable. Examples include cash receipts from the provision of services and royalties, commissions, and other revenue. To generate revenue, companies undertake activities such as manufacturing inventory, purchasing inventory from suppliers, and paying employees.”

Jika diartikan, aktifitas operasi meliputi aktifitas perusahaan sehari-hari untuk menghasilkan pendapatan, seperti menjual persediaan dan menyediakan jasa. Kas masuk yang timbul dari penerimaan jasa dan royalty, komisi dan pendapatan lainnya. Untuk menghasilkan pendapatan,

perusahaan melakukan aktifitas seperti membuat persediaan, memberi persediaan dari rekanan dan membayar karyawan.

Selanjutnya menurut Prastowo (2011:34), pengertian aktivitas operasi adalah:

“...aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan (*principal revenue producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi mencakup semua efek kas dari setiap transaksi atau kejadian yang merupakan komponen penentuan laba bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dagangan, pembayaran kas pembelian bahan kepada supplier, dan pembayaran gaji karyawan perusahaan.”

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa arus kas operasi adalah arus kas yang muncul dari aktifitas perusahaan untuk mendapatkan laba bersih. Aktifitas dimaksud meliputi penerimaan kas dari penjualan barang dan/atau jasa serta pembayaran kas untuk membeli persediaan dari rekanan serta membayar gaji karyawan.

c. Pendapatan (Revenue)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:23.1), menjelaskan bahwa:

“Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.”

Sedangkan menurut Kieso et. al. (2011:955) pendapatan adalah:

“Definition of revenue is as follows: gross inflow of economics benefits during the period arising in the ordinary activities of an entity when those inflow result in increases in equity, other than increases relating to contributions from equity participants.”

Jika diartikan pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi selama periode aktifitas normal suatu entitas, yang menimbulkan

kenaikan dalam ekuitas selain dari penambahan kontribusi dari partisipan ekuitas tersebut.

Sementara menurut Baridwan (2001:20) menjelaskan bahwa “Pendapatan adalah aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan (*Revenues*) adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan, berupa penyerahan barang atau jasa yang dilakukan selama suatu periode tertentu, yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain dari penanaman modal.

d. Piutang

Definisi piutang menurut Kieso et. al. (2011:347) adalah:

“Receivables are also financial assets -they are also a financial instrument. Receivables (often referred to as loans and receivables) are claims held against customers and others for money, goods, or services.”

Jika diartikan adalah piutang juga merupakan aset keuangan – juga sebagai instrumen keuangan. Piutang (biasa dinyatakan sebagai pinjaman atau piutang) adalah klaim terhadap pelanggan dan pihak lainnya untuk uang, barang, atau jasa.

Sedangkan definisi piutang menurut Rudianto (2012:210) adalah:

“Klaim perusahaan atas uang, barang atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu.”

Sedangkan definisi piutang menurut Subramanyam, et.al. (2012:274) adalah:

“Nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa, atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain (utamanya adalah pelanggan) akibat suatu transaksi masa lalu berupa penjualan, sewa, ataupun bunga.

e. Aset Tetap

Menurut Kieso, et. al. (2011:510) pengertian aset tetap atau yang disebut *property, plant, and equipment* adalah:

“aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk memproduksi atau menyuplai barang atau jasa, yang digunakan untuk disewakan kepada orang lain, atau tujuan administrasi, dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode.”

Menurut Rudianto (2012:256), aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan.

Pengertian aktiva tetap menurut Fees, et.al. (2009:492) sebagai berikut:

“Aktiva tetap (fixed assets) merupakan aktiva jangka panjang atau aktiva yang relatif permanen. Mereka merupakan aktiva berwujud (tangible assets) karena terlihat secara fisik. Aktiva tersebut dimiliki dan digunakan oleh perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal.”

Menurut Kieso dan Weygant (2008:566), mendefinisikan bahwa aktiva tetap adalah sumber daya yang memiliki tiga karakteristik yaitu memiliki

bentuk fisik (bentuk ukuran yang jelas), digunakan dalam kegiatan operasional, dan tidak untuk dijual ke konsumen.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:16) pengertian aset tetap adalah:

“Aset tetap adalah aset berwujud yang (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

Menurut Rudianto (2012:257) dari berbagai jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

- a.”Bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Aset tetap tetap jenis ini adalah aset tetap yang dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendaknya tanpa harus memperbaiki atau menggantinya.
- b. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan sebagainya. Aset tetap kelompok kedua adalah jenis aset tetap yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas. Karena itu, jika secara ekonomis sudah tidak menguntungkan (beban yang dikeluarkan lebih besar dari manfaatnya), maka aset seperti ini harus diganti dengan aset lain.
- c. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti tanah pertambangan dan hutan. Kelompok aset tetap yang ketiga merupakan aset tetap sekali pakai dan tidak dapat diperbarui karena kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan wadah luarnya.”

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset yang memiliki wujud fisik, dengan tujuan untuk digunakan dalam produksi sehari-hari ataupun untuk disewakan kepada pihak lain, yang akan digunakan lebih dari 1 periode dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

2.1.4.7.3 *Non Discretionary Accrual*

Menurut Sulistyanto (2008:164) menjelaskan *non discretionary accrual* sebagai berikut:

“*Non discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum, misalnya metode depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi”.

Healy dalam Dwiharyadi (2017) menjelaskan *non discretionary accrual* merupakan: “komponen akrual yang tidak dapat diatur sesuai dengan diskresi manajemen.”

Sedangkan menurut Belkaoui dalam Alim (2009) *non discretionary accrual* yaitu akrual yang sudah ditetapkan oleh standar.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *non discretionary accrual* adalah akrual yang tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen karena sudah menjadi standar dalam prinsip akuntansi. Adapun perhitungan akrual non diskresioner menurut model Jones yang telah dimodifikasi adalah sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rec_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

Keterangan:

NDA = *Non Discretionary Accrual*

A = Total Aset

Rev = Pendapatan

Rec = Piutang

PPE = Aset Tetap (*Property, Plant, and Equipment*)

2.1.5. Agresivitas Pajak

2.1.5.1 Pengertian Agresivitas

Menurut Schneiders dalam Kiswarawati (1992:10) mendefinisikan:

“agresif sebagai suatu bentuk respon yang mencari pengurangan ketegangan dan frustrasi melalui perilaku yang banyak menuntut, memaksa, dan menguasai orang lain.”

Perilaku agresif menurut Buss & Perry dalam Dini dan Indrajati (2014) adalah “perilaku dengan niat untuk menyakiti orang lain yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.”

Sedangkan menurut Koeswara (1988:5) mendefinisikan: “agresif sebagai tingkah laku kekerasan secara fisik maupun secara verbal terhadap individu ataupun terhadap objek-objek.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa agresivitas merupakan tindakan secara keras baik terhadap individu ataupun objek-objek untuk menuntut, memaksa ataupun menguasai orang lain.

2.1.5.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu:

“... iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014:6):

“... prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan langsung secara individu namun digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.5.3 Pengertian Agresivitas Pajak

Adapun definisi agresivitas pajak secara satu kesatuan menurut Balakrishnan et. al. dalam Haryanto dan Hanna (2016) adalah:

“Agresivitas Pajak sebagai manipulasi penghasilan kena pajak menjadi turun melalui perencanaan pajak yang mungkin atau mungkin juga tidak dianggap sebagai penipuan penggelapan pajak”.

Menurut Yoehana dalam Mustika (2017) mendefinisikan agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, illegal, maupun kedua-duanya.

Menurut Frank et. al. dalam Liana et.al. (2013), menjelaskan bahwa:

“*Tax Aggressiveness* yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*.”

Sedangkan menurut Khuruna dan Moser dalam Oktaviana dan Rohman (2004) mendefinisikan: “Tindakan agresivitas pajak merupakan tindakan yang dirancang oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak agar memperoleh keuntungan.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak, baik dengan cara legal ataupun ilegal yang dirancang agar perusahaan memperoleh keuntungan.

Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan agresivitas pajak, Menurut Suandy (2011:2) faktor-faktor tersebut, antara lain:

1. “Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran; dan
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.”

Menurut Pohan (2013:9) beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya:

1. “Tingkat kerumitan suatu peraturan.

Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang terutang.

Makin besar jumlah pajak yang terutang akan makin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3. Biaya untuk negosiasi

Disengaja atau tidak disengaja, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

4. Risiko deteksi

Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko deteksi, wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah diketahui, maka wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.”

2.1.5.4. Metode Pengukuran Agresivitas Pajak

Menurut Hanlon dan Heitzman dalam Rosidi dan Nugroho (2019)

terdapat 12 proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas perusahaan, diantaranya:

Tabel 2.1
Pengukuran Agresivitas Pajak

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
2	Current ETR	$\frac{\text{Current Income Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3	Cash ETR	$\frac{\text{Cash Taxes Expense}}{\text{Pretax Income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income

4	<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$	Sum of cash taxes paid over years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
5	<i>ETR Differential</i>	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6	<i>DTAX</i>	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7	<i>Total BTD</i>	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$	The total difference between book and taxable income
8	<i>Temporary BTD</i>	Deferred tax expense/U.S.STR	The total difference between book and taxable income
9	<i>Abnormal total BTD</i>	$\text{Residual from BTD}/\text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta \text{mi} + e_{it}$	A measure of unexplained total book-tax differences
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	Disclosed amount post-FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
11	<i>Tax shelter activity</i>	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data

12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>
-----------	--------------------------	------------------------------------	---

Sumber: Hanlon dan Heitzman dalam Rosidi dan Nugroho (2019)

Dalam penelitian ini agresivitas pajak diukur menggunakan GAAP ETR, Hanlon dan Heitzman dalam Rosidy dan Nugroho (2019) menjelaskan:

“Pendekatan GAAP ETR lebih mampu menggambarkan penghindaran pajak dibandingkan dengan LTD. Agresivitas pajak dihasilkan dari perbedaan antara penghitungan akuntansi dan fiskal. Ditambah lagi, pengukuran ini merefleksikan *permanent* LTD (*book tax difference*) dan penyesuaian lainnya. Di samping itu, pengukuran ini mengesampingkan efek temporer dari LTD. Beberapa transaksi (seperti ekspor dan kredit pajak) biasanya mengurangi GAAP ETR. Perusahaan sering melakukan transaksi dengan pihak luar negeri untuk tujuan perencanaan pajak dan GAAP ETR mampu menangkap bentuk agresivitas pajak ini. Secara umum, perusahaan mencoba untuk menghindari pajak perusahaan melalui pengurangan penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga pendapatan keuangan mereka menurut perhitungan akuntansi.”

Menurut Chen, et. al. dalam Astuti dan Ariyani (2016) menjelaskan:

“Penggunaan GAAP ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan.”

2.1.5.4.1 GAAP ETR

GAAP ETR digunakan untuk merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal, Frank et al. dalam Hidayanti (2013) menjelaskan:

“GAAP ETR merupakan ukuran keberhasilan atas strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan laba setelah pajak dengan menekan atau meminimalkan beban pajak perusahaan.”

Menurut Pradipta dan Supriadi dalam Putri (2018), menjelaskan GAAP ETR merupakan:

“ ...menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan”.

Menurut Reinaldo dalam Kurnisari dan Listiawati (2019) menjelaskan GAAP ETR adalah:

“...merupakan ukuran hasil berbasis laporan laba rugi yang umumnya dapat mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak yang dilakukan perusahaan dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi.”

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa GAAP ETR merupakan proksi untuk mengukur agresivitas pajak dengan cara membandingkan beban pajak berdasarkan ketentuan akuntansi yang berlaku terhadap laba sebelum pajak.

Menurut Lanis dan Richardson dalam Handayani, et. al. (2018), perusahaan dikatakan melakukan agresivitas pajak apabila nilai GAAP ETR kurang dari tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak PPh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebesar 25 %, sedangkan jika nilai GAAP ETR $\geq 25\%$ artinya perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Rumus matematisnya adalah sebagai berikut:

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

2.1.5.4.2 Beban Pajak

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010:46.5), beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode.

Yang dimaksud beban pajak kini menurut Suandy (2013:89) adalah:

“Jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.”

Sedangkan beban pajak tangguhan menurut Harnanto (2003:112):

“Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang belum dikompensasi.”

Menurut Erly (2008:5) menjelaskan beban pajak merupakan:

“...pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dalam menjalankan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah seluruh pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik berupa beban pajak saat ini ataupun beban pajak tangguhan akibat adanya perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Pajak dianggap sebagai beban karena berkaitan dalam upaya perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya juga sebagai wujud distribusi laba kepada pemerintah.

2.1.5.4.3 Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak menurut Islahuzzaman (2012:239) disebut juga laba operasi bersih (*Net Operating Income*) yaitu penghasilan sebelum dikurangi bunga dan pajak penghasilan.

Menurut Hery (2015:193) laba sebelum pajak penghasilan adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain.

Menurut Soemarso (2002:252):

“Laba bersih sebelum pajak yaitu selisih lebih pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya dan kerugian yang merupakan kenaikan bersih atas modal, sebelum dikurangi pajak.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laba sebelum pajak merupakan selisih antara pendapatan kotor yang berasal dari pendapatan operasional ditambah dengan keuntungan lainnya lalu dikurangi biaya operasional, biaya non operasional, bunga serta kerugian lainnya sebelum dikurangi pajak.

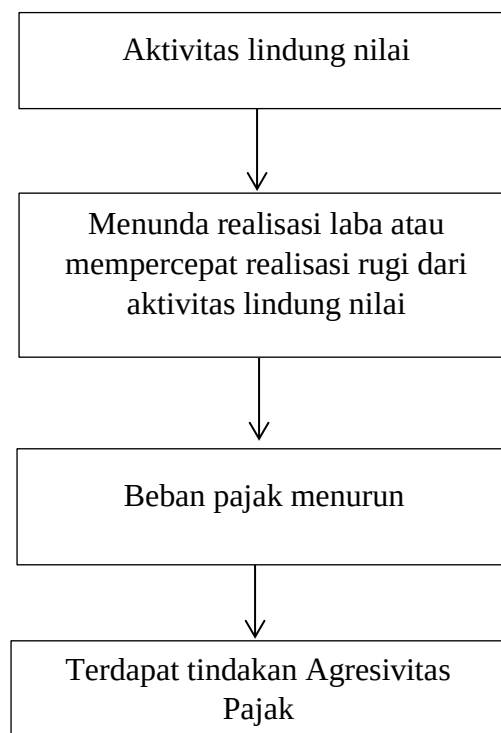
2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Lindung Nilai Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam Devi dan Efendi (2018) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dengan skema lindung nilai dilakukan karena ada perlakuan asimetris antara aspek laporan keuangan dan peraturan perpajakan.

Pada aspek laporan keuangan, risiko yang terjadi atas pendapatan/kerugian dari instrument *hedging* dapat diakui sebagai *unrealized gain/loss* sedangkan dalam aspek perpajakan risiko tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dibebankan (*non-deductible item*). Devi dan Efendi (2018) menjelaskan bahwa cara perusahaan menggunakan lindung nilai untuk melakukan perencanaan pajak adalah dengan cara menunda realisasi laba atau mempercepat realisasi rugi dari lindung nilai untuk mengurangi beban pajak.

Hasil penelitian Devi & Efendi (2018) dan Lee (2016) menemukan bahwa lindung nilai berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kerangka pemikiran pengaruh lindung nilai terhadap agresivitas pajak dapat dilihat pada gambar 2.1.



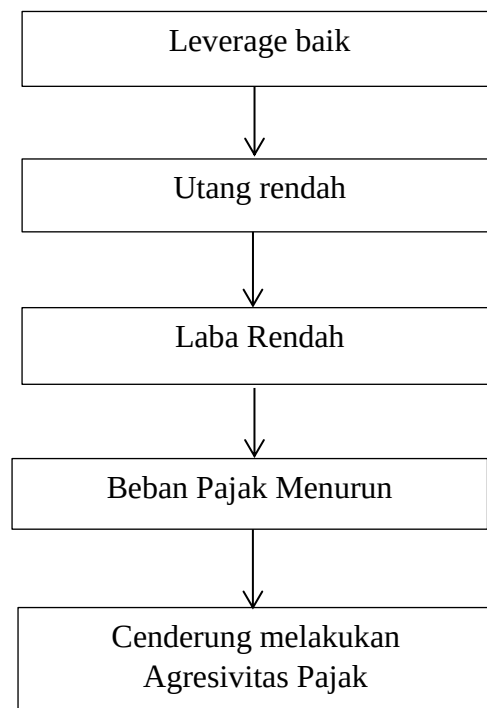
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Pengaruh Lindung Nilai Terhadap Agresivitas Pajak (OECD dalam Bendi & Devi, 2018)

2.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Andhari & Sukartha dalam Rogate & Sofie (2018) *leverage* merupakan rasio yang menandakan seberapa besar perusahaan menggunakan modal eksternal yaitu utang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Andhari & Sukartha dalam Rogate & Sofie (2018) menjelaskan *leverage* berkaitan dengan teori akuntansi positif hipotesis *debt covenant* yang menyatakan semakin tinggi rasio utang atau *leverage* buruk maka semakin besar kecenderungan para manajer untuk memilih prosedur akuntansi untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika pihak manajer memilih prosedur akuntansi untuk meningkatkan laba perusahaan, hal ini juga akan menyebabkan beban pajak perusahaan akan meningkat yang berarti kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak menurun. Demikian pula sebaliknya saat rasio utang menjadi rendah yang berarti kondisi *leverage* baik maka laba yang diperoleh perusahaan lebih sedikit, sehingga menyebabkan beban pajak menurun yang berarti terdapat tindakan agresivitas pajak. Selain itu menurut Rogate & Sofie (2018) saat perusahaan memiliki utang yang tinggi, maka kreditur akan lebih mengawasi perusahaan akibat pinjaman eksternal perusahaan. Sehingga perusahaan dituntut untuk menunjukkan kinerja positif baik dari segi kinerja keuangan ataupun kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Hasil penelitian Nurhandono & Firmansyah (2017), Ruth Rogate Octaviani & Sofie (2018), dan Hidayat & Fitria (2018) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kerangka pemikiran pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dapat dilihat pada gambar 2.2.

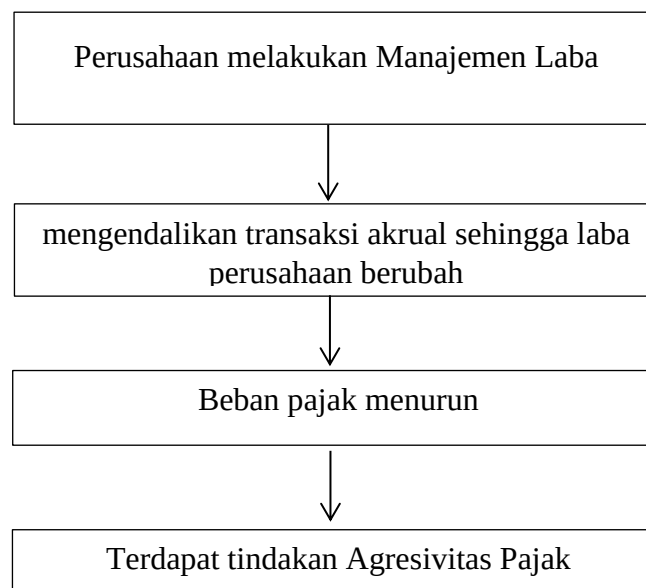


Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak (Andhari & Sukartha dalam Rogate dan Sofie, 2018).

2.2.3 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Scott dalam Cahya & Firmansyah (2018) manajemen laba dilakukan berdasarkan motivasi pajak. Menurut Scott dalam Suyanto dan Suparmono (2012) pajak menjadi masalah bagi perusahaan karena membayar pajak akan menurunkan laba bersih perusahaan, oleh karena itu perusahaan akan melakukan manajemen laba guna mengurangi beban pajak. Menurut Suyanto dan Suparmono dalam Imam et.al. (2016) semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan bahwa agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan juga semakin tinggi karena beban pajak yang semakin kecil.

Menurut Tiaras dan Wijaya (2016) perusahaan melakukan manajemen laba dengan *income increasing* untuk tetap menjaga indikator kinerja perusahaan dan menekan tarif pajak efektif perusahaan. Dengan menurunkan beban pajak, maka membuat laba yang dilaporkan kepada pemilik perusahaan lebih tinggi. Upaya inilah yang mengindikasikan adanya tindakan agresivitas pajak. Menurut Jones dalam Cahya & Firmansyah (2018) bentuk manajemen laba salah satunya berupa *discretionary accrual* dengan mengendalikan transaksi akrual sehingga laba perusahaan berubah namun tidak mempengaruhi arus kas. Hasil penelitian Nurhandono & Firmansyah (2017), Novitasari (2017), Tiaras & Wijaya (2015), dan Fitri & Mulyaningtyas (2018) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kerangka pemikiran pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak dapat dilihat pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak (Suyanto dan Suparmono dalam Imam et.al., 2016)

2.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Lindung Nilai berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

H₂ : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

H₃ : Manajemen Laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak